

Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Oct-2021 09:16 WIB

ID: 1688088919

Word Count: 4153

Submitted: 1

Menimbang Kosmopolitanisme By Robertus Wijanarko

4% match (Internet
from 12-May-2021)

<p>Similarity Index</p> <p>14%</p>	<p>Similarity by Source</p> <p>Internet Sources: 14%</p> <p>Publications: 8%</p> <p>Student Papers: 6%</p>
---	---

<http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/download/110/83>

3% match (Internet from 18-Feb-2020)

https://archive.org/stream/TheGlobalizationParadoxByDaniRodrik/The%20Globalization%20Paradox%20by%20Dani%20Rodrik_djvu.txt

1% match (Internet from 07-Nov-2020)

<https://dokodoc.com/andlighet-och-religiositet-p-fryshuset.html>

1% match (Internet from 28-Jul-2019)

<https://akademai.com/doi/pdf/10.1007/s11059-007-2012-8>

< 1% match (Internet from 31-Aug-2021)

<https://myfilsofi.blogspot.com/2018/11/potret-kini-indonesia-dan-teologinya.html>

< 1% match ()

[Verrax, Fanny. "Making Sense of Rare Earth Elements. An interdisciplinary approach to mineral resources' ethics and governance", The University of Bergen, 2013](#)

< 1% match (Internet from 31-Jan-2020)

<https://es.scribd.com/document/159003284/Cultural-Politics-in-a-Global-Age-Uncertainty-Solidarity-and-Innovation>

< 1% match (Internet from 18-Sep-2019)

<https://es.scribd.com/document/102725206/Y-B-MANGUNWIJAYA-Manusia-Guru-Negarawan-Sutan-Sjahrir-Dan-Relevansinya-Kini-Dan-Di-Hari-Mendatang>

< 1% match (Internet from 11-May-2011)

<http://annatourinho.multiply.com/journal/item/7>

<p>< 1% match (Internet from 15-Mar-2016) http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8318/Anne_Vestergaard.pdf?sequence=1</p>
<p>< 1% match () Beger, Annika. "Neue Medien bei Jugendlichen", 2011</p>
<p>< 1% match (Internet from 16-May-2016) http://docs.di.fc.ul.pt/bitstream/10451/10141/1/ulfl148007_tm.pdf</p>
<p>< 1% match (student papers from 18-Mar-2020) Submitted to UC, Irvine on 2020-03-18</p>
<p>< 1% match (student papers from 09-Sep-2015) Submitted to University of Melbourne on 2015-09-09</p>
<p>< 1% match (Internet from 24-Jun-2021) https://www.cienciasaude.uniceub.br/rdi/article/download/5359/3996</p>
<p>< 1% match (Internet from 26-May-2021) https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/a-new-social-contract-for-the-digital-age/</p>
<p>< 1% match (Internet from 17-Jul-2020) http://www.themontrealreview.com/2009/The-Globalization-Paradox-Democracy-and-the-Future-of-the-World-Economy-by-Dany-Rodrik.php</p>
<p>< 1% match (Internet from 27-Apr-2021) https://mikhaanitaria.blogspot.com/2011/</p>
<p>< 1% match (Internet from 17-Feb-2021) https://masrudimuchtar.wordpress.com/</p>
<p>< 1% match (Internet from 11-Oct-2012) http://prakarsa-rakyat.org/artikel/inisiatif/artikel.php?aid=42243</p>
<p>< 1% match (Internet from 12-Jun-2020) https://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2012/03/proses-dan-implikasi-sosial-politik-pemekaran.pdf</p>
<p>< 1% match (Internet from 18-Aug-2021) http://www.h-mexico.unam.mx/node/6544</p>
<p>< 1% match (Internet from 15-Jul-2020) http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/2344200-36-zbirnik-dopovidey-75-i-naukovoi-konferencii-studentiv-kneu-16-17-kvitnya-2008-udk-3303-bbk-6594-ukr-social.php</p>
<p>MENIMBANG KOSMOPOLITANISME (Globalisasi-Lokalitas) Robertus Wijanarko Ph.D Globalisasi sudah menjadi tema atau subjek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini menandakan bahwa Globalisasi bukanlah fenomena baru. Ada yang menarik garis ke belakang mensinyalir bahwa bibit Globalisasi bisa ditemukan dalam fenomena hegemoni Yunani dan juga dominasi imperium Romawi atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada</p>

juga yang lebih merasa nyaman meletakkan fenomena Globalisasi (modern) berawal sejak maraknya gerakan-gerakan ekspansi negara/kerajaan Eropa (dan kemudian Amerika) untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah perdagangan, yang kemudian menjadi wilayah-wilayah koloni mereka. Entah kapanpun kita meletakkan masa mulainya Globalisasi, keterjalinan antar negara atau bangsa bukanlah fenomena baru. Ketika sebuah subjek kajian telah didekati dari berbagai perspektif atau disiplin ilmu, tentu saja ada banyak metodologi berbeda yang digunakan untuk mengkaji subjek tersebut. Demikian juga dengan fenomena Globalisasi. Ada beberapa metodologi pendekatan kajian fenomena ini, dan juga definisi kerja yang dirumuskan untuk menempatkan subjek kajian ini berdasar minat disiplin ilmu yang terkait. Globalisasi telah menjadi subjek kajian disiplin ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, Kebudayaan, Komunikasi, Kajian Poskolonial, dan juga Filsafat. Untuk menyebut beberapa contoh, kita mengenal John Tomlinson yang menulis buku *Globalization and Culture*, atau Randall Germain (dkk) yang menulis [Globalization and Its Critics: Perspective from Political Economy](#), Doni Rodrik dengan bukunya [The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy](#), dan Peter Singer dengan karyanya *One World: The ethics of Globalization*. Selain didekati melalui berbagai disiplin ilmu, dan berangkat dari beberapa definisi kerja yang berbeda, tema Globalisasi juga dieksplorasi melalui berbagai aspek. Dalam bahasan ini penulis akan menyoroti dinamika korelasi dan ketegangan antara aspek global dan lokal dalam proses Globalisasi/Glokalisasi. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan dari aspek Globalisasi-Lokalitas adalah: Apakah dinamika Globalisasi dan Lokalitas bisa ditempatkan pada arena yang sehat dan seimbang sehingga kedua unsur mendapat ruang untuk hidup dan bertumbuh? Apakah Globalisasi harus berarti pemberangusan unsur-unsur lokal? Apakah tawaran konsep kosmopolitanisme yang menjadi landasan etika Global mungkin dan operasional? Biarpun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan merupakan problem Global, dalam kajian ini penulis berangkat dari konteks Indonesia. Penulis akan berangkat dengan menyajikan fenomena internasionalisasi-Globalisasi kehidupan negara-bangsa Indonesia, dan beranjak ke dinamika Globalisasi dan Lokalitas di Indonesia. Dan akhirnya penulis akan menimbang proposal konsep Kosmopolitanisme dan Etika Global.

INTERNASIONALISASI-GLOBALISASI Kita bertolak dari sebuah definisi kerja (Working Definition). Dari sekian banyak definisi kerja tentang Globalisasi, John Tomlinson, direktur kajian komunikasi dan kebudayaan internasional di Universitas Trent Nottingham, merumuskan sebuah definisi kerja yang cukup umum dan bisa dikenakan oleh aneka disiplin ilmu sebagai titik tolak kajiannya, biarpun definisi ini bisa dikritisi sebagai terlalu umum. Dalam karyanya, *Globalization and Culture*, Tomlinson merumuskan, sebagai sebuah keterjalinan yang kompleks, "the [Globalization refers to the rapidly developing and ever-densening network of interconnections and interdependences](#)."¹ Definisi ini masih dekat sekali dengan definisi Anthony McGrew, ahli kajian hubungan internasional di Universitas Southampton, yang mendefinisikan Globalisasi sebagai "the intensification of global interconnectedness".² Menurut hemat Penulis, kedua definisi kerja tersebut mengandaikan bahwa Globalisasi merupakan perkembangan dari fenomena yang sudah lama terjadi yakni keterjalinan antara [negara yang satu dengan negara yang lain. Dengan kata lain](#) globalisasi dimaknai sebagai intensifikasi saling keterjalinan dan kebergantungan antar negara atau wilayah dan peradaban di dunia ini yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kata intensifikasi menandakan adanya fenomena yang sudah lama berlangsung dalam sejarah kehidupan antar negara atau peradaban, yang mengalami fase

baru dimana keterjalinan itu menjadi lebih intensif, mendalam, dan kompleks. Dengan demikian selain bisa dikatakan "netral" [1 John Tomlinson, *Globalization and Culture* \(Cambridge: Polity, 1999\), 2.](#) [2 Anthony McGrew, *Modernity and Its Futures* \(Cambridge: Polity, 1992\), 65.](#) kedua definisi kerja tersebut mengisyaratkan unsur "ketidak baruan" dari fenomena keterjalinan antara negara-bangsa. Tanpa bermaksud mereduksi fenomena Globalisasi semata-mata sebagai peristiwa ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai "globalisasi" kapitalisme, penulis cenderung membicarakan awal mula globalisasi (modern) dengan memanfaatkan kerangka penjelasan Hannah Arendt tentang asal mula sejarah eksplorasi-ekspansi-kolonialisme barat. Arendt berangkat dari asumsi bahwa [watak dasar dari kapital adalah membiakkan diri.](#)³ [Itulah sebabnya ketika wilayah Eropa barat, dan kemudian Amerika utara, tidak lagi](#) menyediakan ruang yang memadai untuk pembiakan modal, dicarilah wilayah-wilayah baru dimana usaha pembiakan modal bisa terus berlangsung. Dari sini mulailah aneka ekspedisi untuk menemukan dan mengeksplorasi wilayah-wilayah baru, sebagai medan untuk aneka aktivitas pengembangan modal. Zona perdagangan baru terbentuk, wilayah-wilayah baru penyedia bahan mentah industri ditemukan, tenaga kerja murah diorganisir, infrastruktur mulai dibangun. Keterjalinan berbagai negara mulai ter-rakit dengan ikatan yang lebih kuat. Munculah kemudian era kolonialisme dan imperialisme. Demikian juga ketiga kolonialisme dan imperialisme berlalu, dan banyak negara-bangsa berusaha membangun identitas (benteng) dengan batas teritori, ideologi, dan sistem hukumnya sendiri, kebutuhan akan pembiakan modal tetap terus terjadi. Akibatnya, [usaha-usaha untuk menjebol batas-batas teritori, ideologis, dan yuridis, yang berusaha](#) ditata [oleh negara-bangsa, terus berlangsung](#) bahkan hingga saat ini. Berangkat dari asumsi dasar Hannah Arendt tersebut dan merunut genesis eksplorasi-ekspansi-kolonialisme barat yang merakit keterjalinan antar negara, pun di era pasca kolonialisme tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang kemudian disebut sebagai globalisasi, adalah upaya untuk menggabungkan sebuah pola ekonomi yang berbasis pada usaha-usaha untuk pembiakan modal (kapitalisme). Dewasa ini keterjalinan internasional tersebut berkembang menjadi keterjalinan-kebergantungan global yang sangat intensif. Walaupun berbagai negara-bangsa dalam banyak aspek semakin mandiri, [pada saat yang sama mereka juga menyadari bahwa](#) eksistensi mereka terjalin dan bergantung satu sama lain. Kata-kata kunci seperti [3 Hannah Arendt, *The Origins of the Totalitarianism* \(New York: A Harvest Book, 1968\), 135.](#) Bdk. [Robertus Wijanarko, *Memahami Medan Pelayanan Gereja Indonesia Dewasa Ini, dalam Raymundus Sudhiarsa dan Paulinus Yan Olla, *Menjadi Gereja Indonesia yang Gembira dan Berbelaskasih* \(Malang: STFT Widya Sasana, 2015\), 274.*](#) "interconnectedness", "Intensification", dan "interdependence" sebagaimana digunakan oleh Tomlinson dan McGrew menemukan maknanya. Keterjalinan dan kesaling bergantung yang sangat intens tersebut tidak hanya terkait dengan urusan ekonomi, tetapi juga politik, kebudayaan, agama, sosial, hukum, ekologi dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Keterjalinan dan kesaling bergantung yang sangat intens tidak hanya melibatkan komponen negara tetapi juga unsur-unsur korporasi (trans-national), lembaga swadaya masyarakat, pegiat agama-budaya-kemanusiaan, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.

KETERJALINAN GLOBAL DAN PROBLEM GLOBALISASI-LOKALITAS

Supaya pembahasan tentang problem Globalisasi dan Lokalitas mempunyai referensi konkret dan dengan demikian bisa membantu kita untuk memahami lebih baik dan mendalam problematika seputar tema ini, penulis meninjau problem Globalisasi dan Lokalitas dari konteks Indonesia.

Karena struktur dasar problematika dinamika Globalisasi dan Lokalitas yang terjadi di Indonesia juga akan dijumpai di negara manapun, tentu dengan beberapa nuansa yang membedakannya. Seperti halnya semua negara di dunia, Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan posisi geografis yang strategis juga tidak terlepas [dari proses Globalisasi. Proses](#) - proses [ekonomi](#), sosial, [budaya, agama](#), dan politik, [yang kait-mengkait, yang terjadi di](#) bagian [wilayah tertentu dari](#) globe [ini tentu](#) mempunyai [implikasi yang serius](#) dan mendalam [terhadap kehidupan kita](#) sebagai bangsa dan negara, dan demikian juga sebaliknya. Dinamika kehidupan bangsa dan negara kita juga mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Globalisasi memang merupakan intensifikasi keterjalinan dari negara atau bangsa yang membuat eksistensi mereka saling bergantung, interdependensi. Kita bisa meng-"close-up" beberapa fenomena yang terjadi di negara kita.

a. Dalam Bidang Ekonomi

Sebagai bangsa yang mengalami penjajahan selama periode yang panjang, pertumbuhan kehidupan ekonomi kita tidak terlepas dari residu-residu struktur ekonomi masa kolonialisme. Peta aktivitas ekonomi dan infrastruktur yang terbangun hingga dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peta aktivitas ekonomi dan infrastruktur era kolonial. Peran ekonomi bangsa kita di era kolonial sebagai pemasok hasil-hasil tambang dan penyedia bahan mentah bagi kehidupan ekonomi di negara penjajah hingga dewasa ini juga belum berubah sepenuhnya. Kebergantungan kehidupan ekonomi kita terhadap bantuan asing juga belum berakhir. Nasib bangsa kita sebagai penyedia tenaga kerja/kuli murah di era kolonial juga masih kita teruskan hingga dewasa ini. Namun sejak era kemerdekaan para pemimpin negara kita mencari bentuk sistem ekonomi yang bukan sekedar skema parodi dari sistem ekonomi kolonial. Muhammad Hatta antara lain mulai memikirkan sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat.⁴ Setelah itu wacana-wacana seputar ekonomi Pancasila juga mulai diketengahkan. Diskusi-diskusi seputar sistem ekonomi Pancasila, pembangunan kekuatan ekonomi agraris, pemanfaatan seluruh [sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat](#), kehidupan ekonomi berkeadilan sosial selalu dilakukan di berbagai ranah kehidupan. Namun demikian wacana dan usaha-usaha untuk menata sistem ekonomi nasional, berjalan seiring dengan bertumbuhnya aktivitas, struktur relasi dan sistem ekonomi yang beradaptasi dengan gelombang besar perkembangan ekonomi kapitalisme liberal dunia. Dan dalam perjalanan waktu yang panjang kehidupan ekonomi kita dihadapkan pada fenomena tarik menarik antara cita-cita untuk mengembangkan ekonomi nasional dan usaha-usaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika ekonomi global yang semakin berwatak kapitalistik yang bertumpu pada sistem kebebasan pasar. Dinamika kehidupan dan pertumbuhan ekonomi kita berada pada simpul persimpangan dan tarik menarik antara, di satu pihak, usaha dan cita-cita untuk membangun kekuatan ekonomi bertumpu pada aktivitas ekonomi rakyat dan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat, namun, di pihak lain, kehidupan dan kebijakan ekonomi yang kita tempuh juga dikondisikan oleh tekanan-tekanan yang berat dari sistem kapitalisme liberal. Kita berada dalam dinamika dan ketegangan antara "lokalitas" ekonomi Pancasila dengan Globalisasi kapitalisme liberal. Ketika intensitas keterjalinan antara negara atau bangsa semakin meningkat, peran negara dalam mengatur lalu lintas relasi lintas negara tidak lagi dominan, kemudian ⁴ [J. D. Legge, Intellectuals and Nationalism in Indonesia](#) (Ithaca: Cornell University, 1998), 21-24. ⁵ lembaga-lembaga non pemerintah punya peran yang semakin besar dalam menentukan bentuk-bentuk relasi yang terjalin.

Dengan kata lain, intensitas keterjalinan lembaga lembaga dan kekuatan ekonomi lintas negara dan lembaga dan kekuatan gerakan-gerakan swadaya masyarakat internasional menyebabkan munculnya komponen-komponen kehidupan transnasional, yang tidak mudah diatur dan dikendalikan oleh kekuatan negara. Kenyataan ini semakin menyulitkan negara kita untuk membangun kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, atau berdasar sendi-sendi tata ekonomi lokal. Sebaliknya, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa kita semakin cenderung terjebak pada pengaruh hegemonik kekuatan kapital dan bertumpu pada persaingan pasar. Kita menyaksikan betapa aktivitas ekonomi rakyat banyak yang terpinggirkan oleh aktivitas ekonomi kekuatan-kekuatan kapitalisme liberal dengan hadirnya sistem bisnis waralaba misalnya. Maraknya gerai Indomart, Alfamart, Giants, Carrefour, CFC, McDonal's, Pizza Hut, dan lain sebagainya menyingkirkan aktivitas ekonomi rakyat. Demikian juga lincahnya aliran pergerakan kapital transnasional juga mengurangi kekuatan dan daya tawar negara agar modal tetap dikembangkan di Indonesia dan dengan demikian membuat aktivitas ekonomi tetap hidup, baik untuk modal-modal yang digunakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam maupun korporasi-korporasi manufacture. Selain itu, monopoli (hegemonik) teknologi pangan juga membuat usaha-usaha pengembangan pertanian di negara kita dikendalikan oleh negara-negara kapitalis yang menguasai teknologi tersebut. Dalam banyak kasus kita bisa menyimak bahwa yang terjadi bukan proses negosiasi dan kontestasi yang seimbang antara negara dan korporasi-korporasi transnasional, tetapi ketidakberdayaan negara dalam menghadapi tekanan dari korporasi-korporasi transnasional, demi untuk menghindari larinya modal ke negara lain. Dengan demikian cita-cita untuk membangun ekonomi Pancasila semakin menjadi utopia, sementara yang terbentuk adalah aktivitas dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Lokalitas semakin tergenjot dan tersingkir oleh Globalisasi. b. Dalam Bidang Kebudayaan Kebudayaan merupakan kata kerja. Kebudayaan mencakup sistem nilai, institusi, dan produk budaya. Para pemikir cenderung melihat kebudayaan nasional Indonesia merupakan akumulasi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional juga merupakan 6 produksi dari proses hibridasi atau persilangan antara tradisi budaya yang satu dengan yang lainnya antar komunitas budaya lokal, atau antara tradisi budaya lokal dengan komunitas budaya-budaya yang lebih luas. Sebagaimana kita ketahui pengaruh kebudayaan Hindu, Islam, dan Cina dalam proses pembentukan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia cukup besar. Demikian juga pengaruh kebudayaan-kebudayaan kontemporer dari wilayah bangsa yang kuat, misalnya Eropa dan Amerika, terhadap proses perkembangan budaya di Indonesia juga cukup besar. Dengan demikian proses pembentukan atau pertumbuhan kebudayaan nasional Indonesia juga sudah lama terjalin dengan kebudayaan-kebudayaan internasional lainnya. Fenomena Globalisasi mengintensifikasi keterjalinan tersebut. Untuk meneropong bagaimana dinamika unsur global dan lokal dalam konteks Globalisasi kita bisa menyimak bagaimana produksi budaya baru sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembiakan modal baik dalam tataran asialogis, institusional maupun ragam produk-produk budaya. Walaupun langkah ini cenderung reduktif, namun cukup membantu kita untuk memberi gambaran betapa fenomena dominan yang kita alami adalah proses marginalisasi kebudayaan lokal oleh kebudayaan yang sesuai dengan kepentingan diseminasi kapitalisme liberal. Dari pengalaman hidup kita, kita bisa menyaksikan betapa di banyak tempat terjadi proses penyingkiran bentuk-bentuk budaya tradisional oleh maraknya produksi dan reproduksi budaya massa. Masyarakat kita yang

sebelumnya, melalui proses yang panjang, memproduksi bentuk-bentuk budaya tradisional beserta nilai-nilai yang dikandungnya, berubah menjadi kaum penikmat produk budaya-budaya virtual-digital yang miskin akan simbol, makna, dan proses pembatinan nilainya. Selain disebabkan oleh proses marginalisasi kebudayaan tradisional oleh bentuk budaya massa, dengan perkembangan teknologi komputer dan audio visual/digital, ruang kebudayaan tradisional juga semakin dipersempit oleh pengaruh-pengaruh kebudayaan kontemporer yang seringkali berkiblat pada bentuk-bentuk kebudayaan negara-negara yang secara hegemonik mempunyai pengaruh dominan. Hal yang sama terjadi di dalam ranah bentuk kebudayaan yang lain, yaitu teknologi transportasi dan telekomunikasi, budaya industri dan korporasi, dan lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi di negara kita. Dengan demikian kita dihadapkan pada proses-proses kontestasi antara budaya lokal- tradisional dengan bentuk-bentuk kebudayaan hibrid-kontemporer yang cenderung berkembang karena digerakkan oleh kebutuhan untuk pengembangan kapital. Ekses yang gampang diidentifikasi dari proses Globalisasi kebudayaan semacam itu adalah terjadinya gejala "diskontinuitas" kebudayaan. Masyarakat mulai kehilangan bentuk-bentuk kebudayaan tradisional yang biasa menjadi referensi dan memberikan orientasi nilai, tetapi juga belum menemukan bentuk-bentuk kebudayaan baru yang membantu memberi makna bagi dunia baru dan pengalaman hidupnya. Problem kebudayaan yang muncul sebagai akibat perkembangan globalisasi juga semakin kompleks ketika kita melihat bertumbuhnya wilayah-wilayah urban, kantong-kantong penampung pekerja migran yang tersebar di banyak negara, dan berkembangnya proses deterritorialisasi budaya. Ketika hidup di wilayah-wilayah baru, sektor-sektor kerja dan habitat baru, kaum urban-migran bertemu dengan bentuk-bentuk budaya baru yang diusung oleh anggota komunitas baru yang dijumpainya. Pengalaman semacam itu bukanlah peristiwa yang mudah, karena selalu dibutuhkan proses-proses kontestasi dan negosiasi di antara mereka untuk menyepakati bentuk budaya mana yang mereka gunakan untuk membangun kohesitas sosial dan menjadi referensi dalam memaknai hidup dan pengalaman mereka. Mereka juga perlu menyepakati cetusan-cetusan budaya yang berdaya guna untuk mengekspresikan aneka pengalaman dan pergulatan hidup mereka. Namun, seiring dengan ketersapihan mereka dengan kebudayaan tradisional, seringkali mereka bersauh pada bentuk-bentuk budaya dominan dewasa ini, yang memberi prioritas pada apa yang lahiriah, langsung, terlihat, cepat, dangkal, dan sementara.⁵ Dengan demikian seiring dengan Globalisasi yang cenderung meminggirkan kebudayaan lokal dan tradisional, bentuk-bentuk budaya baru yang masih diproduksi juga cenderung untuk dipengaruhi oleh kepentingan untuk mengembangkan modal. Dalam perspektif ini, Globalisasi sama dengan komersialisasi dan kapitalisasi kebudayaan. c. Dalam Bidang Hukum Belum lama berlalu, negara kita mendapat tekanan dari beberapa negara internasional terkait dengan putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada beberapa pengedar narkoba. Bahkan ada negara yang menarik duta besarnya dari Indonesia sebagai reaksi dan protes terhadap keputusan hukum di Indonesia. Selain itu, kita juga mendapatkan reaksi keras dari banyak negara tetangga terkait dengan bencana asap dari kebakaran hutan di Kalimantan, 5 Evangelii Gaudium, 63. 8 Sumatera, dan Papua. Bahkan beberapa negara mengancam memboikot produk Indonesia. Selain itu usaha-usaha untuk melindungi dan membela hak-hak para tenaga kerja kita di luar negeri, rupanya juga tidak bisa dilakukan semata-mata bertolak dari kebijakan dan sistem hukum di Indonesia. Belum lagi tekanan dunia internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, konflik antar

agama, dan tekanan terhadap kelompok minoritas dalam menjalankan kebebasan beragama. Reaksi-reaksi tersebut merupakan bukti nyata betapa kita tidak bisa lagi menyusun dan mengembangkan sistem dan produk hukum serta aneka regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, kita tanpa mengindahkan apa yang menjadi konsern masyarakat global. Selain itu, menguatnya wacana dan gerakan global yang mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak asasi dan martabat keluhuran manusia juga mempengaruhi negara kita dalam membangun produk dan sistem hukum, serta regulasi-regulasi terkait dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Demikian juga beberapa institusi penegakan hukum juga mengibarkan diri sebagai institusi yang ingin membangun karakter penegakan hukum yang mengindahkan hak-hak asasi dan martabat manusia. Mereka ingin membangun kultur institusi yang peka terhadap hak-hak asasi dan keluhuran martabat manusia. Tidak kalah pentingnya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang advokasi, yang nota bene juga punya jejaring transnasional, juga getol mengkapanyekan kepekaan terhadap isu- isu hak asasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Merujuk pada deretan fenomena tersebut, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa usaha-usaha untuk membangun kultur institusi hukum, menata sistem hukum, dan menciptakan produk hukum tidak bisa semata-mata merujuk pada konstitusi dasar negara kita, dan unsur-unsur nilai budaya lokal, atau hanya bertumpu pada usaha-usaha menciptakan komformitas sosial yang menjadi ciri komunal masyarakat kita. Sebaliknya, kita juga perlu memperhitungkan apa yang menjadi isu-isu, konsern, dan kepentingan global sebagai referensi dalam menata sistem hukum, membangun kultur lembaga peradilan, dan dalam menyusun produk hukum. Dengan kata lain, keleluasaan kita untuk membangun sistem, lembaga, dan produk hukum yang bertumpu pada unsur-unsur lokalitas, mulai dibatasi oleh wacana-wacana dan gerakan terkait dengan isu-isu yang muncul sebagai akibat Globalisasi. Dalam kehidupan hukum negara kita, kita juga menjumpai dinamika kontestasi antara unsur Global dan Lokal. 9 d. Dalam bidang Politik Kontestasi unsur-unsur global dan Lokalitas selain terjadi di bidang ekonomi, kebudayaan, dan hukum, juga merambah wilayah kehidupan Politik. Sebagaimana bisa kita amati dukungan dan keyakinan bahwa pilihan untuk membangun kehidupan politik berasas demokrasi Pancasila merupakan pilihan yang sudah tepat, semakin terus menguat. Seiring dengan munculnya gerakan reformasi, menyusul runtuhnya rezim orde baru, dan seiring dengan gelombang globalisasi demokrasi, usaha untuk membangun demokratisasi kehidupan politik diyakini oleh komunitas yang semakin luas sebagai masa depan tata politik kita. Biarpun dalam usaha untuk membangun demokratisasi politik kita dihadapkan pada banyak kendala, antara lain adanya struktur sosial feodalistik dan aneka wajah pragmatisme politik, namun hal itu tidak menyurutkan keyakinan bahwa sistem politik demokrasi Pancasila merupakan sistem yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Sistem demokrasi Pancasila selain memperhatikan hak-hak dasar setiap warga negara dalam percaturan kehidupan politik, juga mengedepankan sistem perwakilan dan proses permusyawaratan dalam menghasilkan kesepakatan-kesepakatan politik. Prinsip-prinsip perwakilan, musyawarah untuk mufakat, dan semangat gotong royong menjadi asas-asas dasar dalam tata kehidupan politik. Prinsip-prinsip dasar ini berpijak pada pandangan tentang manusia yang menyeimbangkan dimensi individual dan komunal dari setiap pribadi manusia. Pandangan tentang manusia yang hidup dalam budaya yang mengedepankan gotong royong dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Bisa dikatakan unsur-unsur budaya dan pemahaman tentang manusia semacam inilah

yang bisa dikategorikan sebagai unsur- unsur lokal dari budaya politik bangsa kita. Namun demikian, sementara bangsa kita berusaha untuk membangun sistem dan budaya politik demokratis berdasar prinsip demokrasi Pancasila, pengaruh-pengaruh ideologi asing, utamanya demokrasi liberal a la Barat juga menjadi semacam "intrusi" bagi kehidupan dan dinamika politik di Indonesia. Paham demokrasi liberal yang menekankan prinsip "one man, one vote" yang dibangun dari asumsi filsafat manusia yang menekankan individualitas dan kebebasan setiap pribadi manusia ini dengan berbagai cara dan momentumnya berusaha diusung dalam kancah percaturan politik di Indonesia. Gagalnya lembaga parlemen dalam menghasilkan suatu keputusan bulat melalui musyawarah untuk mufakat, dan diganti dengan voting mencari pendapat mayoritas merupakan indikasi bahwa 10 budaya politik demokrasi liberal semakin mempunyai pengaruh yang kuat, dibandingkan usaha-usaha untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dengan demikian di wilayah kehidupan politik, dimana kita sedang mengembangkan prinsip-prinsip demokratisasi Pancasila, kita juga bisa menjumpai adanya kontestasi unsur lokal dan Global, antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. PAHAM BUDAYA KONTEMPORER DAN KOSMOPOLITANISME Dengan menyimak fenomena Globalisasi dari konteks Indonesia kita menemukan adanya aneka proses negosiasi dan kontestasi [antara unsur-unsur Lokal dan unsur-unsur Global](#). Kita juga melihat kecenderungan menurunnya pengaruh menentukan dari negara dalam mengontrol dan mengatur aneka interaksi unsur-unsur Global dan nasional. Sementara itu kekuatan-kekuatan non pemerintah entah itu korporasi multinasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun gerakan atau organisasi transnasional, dan juga aneka jejaring lintas negara tidak lagi merupakan kekuatan yang bisa diremehkan. Dengan demikian dominasi aneka kekuatan atau jejaring transnasionl, dan kedigdayaan kekuatan kapitalisme liberal akan semakin menentukan arah dan dinamika kehidupan bangsa kita, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, hukum, maupun politik. Belum lagi kita dihadapkan pada kenyataan menyadihkan yaitu perlahan tetapi pasti aneka warisan kebudayaan tradisional, yang memberi orientasi dan menjadi referensi kehidupan kita, semakin kehilangan para penyokongnya, yaitu manusia Indonesia sendiri. Dihadapkan pada kebuntuan semacam ini bagaimanakah kita tetap menjalani kehidupan kita ditengah-tengah arus pengaruh Globalisasi yang semakin tak terbendung ini, seraya berusaha membangun kehidupan bernegara yang tetap mempunyai peran pentingnya? Akankah semua wilayah kehidupan akan tereduksi menjadi ruang-ruang pembiakan kapital semata? Bagaimana kita keluar dari kehidupan yang menilai manusia hanya sebagai sarana produksi dan "mesin" tukang konsumsi belaka? Terkait dengan usaha menjaga keseimbangan antara peran negara dan kekuatan pasar Dani Rodrik, dalam pengantar karyanya The Globalization paradox, mengartikulasikan bahwa pasar dan pemerintah itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Demikian dia menulis: [Replacing our economic world on a safer footing requires a better understanding of the fragile balance between markets and governance. I will offer an alternative narrative in this book based on two simple ideas. First, markets and governments are complements, not substitutes. If you want more and better markets, you have to have more \(and better\) governance. Markets work best not where states are weakest, but where they are strong. Second, capitalism does not come with a unique model. Economic prosperity and stability can be achieved through different combination of `insitutional arrangements in labor markets, finance, corporate governance, social welfare, and other areas. Nations are likely to -and](#)

[indeed are entitled to- make varying choices among these arrangements depending on](#) thier [needs and values](#).⁶ Beberapa butir pemikiran dalam kutipan tersebut patut dicatat. Pertama-tama digaris bawahi bahwa negara dan sistem/kehidupan ekonomi itu saling berko-eksistensi. Selain itu Sistem ekonomi kapitalisme itu tidak tunggal, tetapi jamak, dia bisa mengakomodasi unsur- unsur lokalitas. Demikian juga suatu sistem pemerintahan (demokratis) juga mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi kapitalis, bahkan tentunya dengan sistem kapitalisme liberal sekalipun. Berangkat dari beberapa asumsi tersebut kita bisa memikirkan bahwa kita mempunyai celah untuk menawarkan unsur-unsur lokal yang bernilai dalam mengembangkan sistem dan budaya ekonomi kapitalistik. ⁷ Cara pandang semacam ini akan menghindarkan kita dari sikap-sikap defensif ketika berhadapan dengan gelombang kapitalisme. Terkait dengan intensitas jalinan aneka jejaring baik dalam lingkup aktivitas ekonomi, sosial, yuridis, perubahan iklim, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, yang dalam perjalanan waktu mengurangi dominasi peran sentral negara, kiranya kita perlu memandang serius peran positif dari lembaga-lembaga transnasional yang terbukti bisa berjalan efektif. Masing-masing negara tidak mungkin lagi mengatasi sendiri isu-isu global, seperti krisis perubahan iklim, kejahatan kemanusiaan global (narkoba, korupsi, terorisme), hak asasi manusia, masalah perburuhan, dan jaminan kesejahteraan sosial. Kita perlu ⁶ [Dani Rodrik, The Globalization Paradox \(New York: W.W. Norton and Company, 2011\), xviii](#) ⁷ [Bdk Hana Panggabean, Kearifan Lokal dan Keunggulan Global \(Jakarta: Kompas Gramedia, 2014\)](#). Dalam buku ini, antara lain diulas betapa sejarah kemajemukan budaya di Indonesia, menyumbang sensitifitas orang Indonesia ketika masuk dalam lingkungan pergaulan korporasi transnasional. mendorong penguatan peran lembaga-lembaga transnasional terkait dengan aspek-aspek kehidupan tersebut, untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang seimbang, didasarkan pada itikad baik (etika Global) untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan seimbang. Dengan nada yang optimis Peter Singer menulis, "[we should be developing the ethical foundations of the coming era of a single world community.....we therefore need to strengthen institutions for global decision-making and make them more responsible to the people they affect](#)."⁸ Kehadiran lembaga-lembaga yang menawarkan program jaminan sosial, kerja sama internasional dalam menangani buruh, kaum migran, dan perdagangan manusia, lembaga peradilan internasional untuk menangani kasus-kasus kejahatan kemanusiaan, perjanjian-perjanjian internasional untuk memberantas korupsi dan pencucian uang, serta aneka bentuk kerja sama untuk mengatasi kerusakan alam dan krisis iklim, kiranya perlu didukung sekaligus tetap terus dikritisi. Terkait dengan fenomena krisis kebudayaan yang dialami oleh negara kita, dan juga banyak negara berkembang lainnya, penulis mengusulkan, bahwa di satu pihak kita tetap perlu melestarikan tradisi budaya yang masih bisa membantu (relevan) untuk memaknai pengalaman hidup dan menjadi dasar orientasi nilai dalam masyarakat Global; tetapi, di lain pihak, kita tidak perlu terpaku pada nostalgia akan budaya masa lalu atau berpikir tentang homogenitas-koheritas komunitas budaya tertentu, tetapi kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang budaya. Kebudayaan hendaknya tidak kita maknai semata-mata sebagai warisan seperangkat nilai, institusi, ataupun produk-produk atau yang sering disebut sebagai "sampah" kebudayaan. Tetapi kebudayaan adalah suatu produksi. Apa saja yang kita tekuni dan kita geluti dalam pengalaman keseharian itulah kebudayaan. Terinspirasi oleh gagasan Raymond William tentang "culture is ordinary", David Trend, seorang profesor Seni Studio dari Universitas California,

dalam bukunya *Everyday Culture* berpendapat bahwa budaya ditemukan dalam aktivitas keseharian yang digeluti secara ajeg dan rutin.⁹ Karena rangkaian produksi tindakan itulah yang merajut wajah kebudayaan dan memproduksi budaya. Melalui tindakan kesehariannya manusia memproduksi identitas dirinya dalam budaya. ⁸ [Peter Singer, *One World: The ethics of Globalization* \(New Haven: Yale University Press, 2002\)](#), 196-201. ⁹ [David Trend, *Everyday Culture: Finding and making Meaning in a Changing World* \(California: Paradigm Publishers, 2007\)](#) Ketika kita melihat dengan serius perspektif kebudayaan versi posmodernisme ini, kita perlu menimbang tawaran tentang ide kosmopolitansime, yang juga muncul dalam wacana Globalisasi. Kita simak lebih dekat gagasan Kosmopolitanisme ini. Secara etimologis terminus kosmopolitan berasal dari bentukan kata Yunani "kosmos" (dunia) dan "polis" (kota). Dengan demikian kosmopolitan berarti warga dunia. Berangkat dari perspektif kebudayaan [John Tomlinson](#) berpendapat, "[Being a 'citizen of the world' for our purposes means having a cultural disposition which is not limited to the concerns of the immediate locality, but which recognizes global belonging, involvement and responsibility and can integrate these broader concerns into everyday life practices.](#)"¹⁰ Kosmopolitanisme tidak harus menjadi warga sipil dari sebuah institusi "negara global", tetapi lebih merupakan disposisi budaya. Di Era globalisasi, ketika individu-individu "terlepas" atau tersapih dari induk komunitas kulturalnya, dan berusaha merajut budaya baru melalui pilihan-pilihan keseharian hidupnya, mereka perlu menciptakan semacam "internal-liminal-space" kesadaran sebagai warga masyarakat semesta, yang menjadi dasar dalam mengembangkan komitmen solidaritas semesta. Disposisi ini menumbuhkan cita rasa memiliki, keterlibatan, dan tanggungjawab sebagai warga dunia. Disposisi ini menumbuhkan sikap positif dan inklusif, bukan eksklusif.¹¹ Namun demikian, John Tomlinson juga meneruskan bahwa disposisi kultural kosmopolitanisme masih bernuansa "eksklusif-lokalitas." Tomlinson menulis, "For it is 'solidary individualism' that drives mutuality, this seems in principle a more flexible dynamic than other account of moral localism."¹² Kiranya proposal ini perlu menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, sehingga kita tetap menemukan makna eksistensi kita sebagai subjek di tengah proses-proses yang sangat kompleks dari Globalisasi. ¹⁰ John Tomlinson, *Globalization*, 186. ¹¹ [Gary A. Olson and Lynn Worsham \(eds.\), *Race, Rethoric and The Postcolonial* \(New York: State University of New York Press, 1999\)](#), 28. ¹² John Tomlinson, *Globalization*, 207.

Bibliografi [Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*, New York: A Harvest Book, 1968](#) Fransiskus. [*Evangelii Gaudium \(Seruan Apostolik Paus Fransiskus 24 November 2013\)* \(terj.\), Jakarta: Dokpen KWI, 2014.](#) Germain, Randall (ed.). *Globalization and Its Critics*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. [Legge, J.D. *Intellectuals and Nationalism in Indonesia*, Ithaca: Cornell Univeristy Press, 1988.](#) Olson. [Gary A. and Lynn Worsham \(eds.\). *Race, Rethoric, and The Postcolonial*, New York: State University of New York Press, 1999.](#) [Panggabean, Hana \(dkk\) eds. *Kearifan Lokal Keunggulan Global*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.](#) [Rodrik, Dani. *The Globalization Paradox*, New York: W.W. Norton and Company, 2011.](#) Sudhiarsa, Raymundus (dkk). *Menjadi Gereja Indonesia yang Gembira dan Berbelaskasih*, Malang: STFT Widya Sasana, 2015. [Trend, David. *Everyday Culture: Finding and Making Meaning in a Changing World*, California, 2007](#) . Tomlinson, John. *Globalization and Culture*, [Cambridge: Polity Press, 1999.](#) [Singer, Peter. *One World: the Ethics of Globalization*, New Haven: Yale University Press, 2002.](#) 1 2 3 4 11 12 13 14 15